

---

# RENCANA KERJA

---

BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI RIAU

---

TAHUN 2018

---

**TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI RIAU YANG BAIK,  
PROFESIONAL DAN HANDAL**

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2014–2019 yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat program, kegiatan, target, indikator outcome, indikator output, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi good financial governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, profesional dan terpercaya dan handal.

Dengan ditetapkannya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2014 – 2019.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,**



**INDRAWATI NASUTION**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600104 198703 2 004**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2015	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	23
2.4 Review Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	44
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD BPKAD s/d Tahun 2016 Provinsi Riau.....	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Riau .....	25
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPKAD.....	37
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.....	42
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Riau.....	46



**GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU**

**Nomor : 485 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 31).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah diverifikasi meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Kebudayaan;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Dinas Pariwisata;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

27. Inspektorat Daerah;
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Penghubung;
32. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan;
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Satuan Polisi Pamong Praja;
38. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
39. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
40. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.

**KETIGA**

- : Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018 pada Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Keputusan Gubernur ini.

**KEEMPAT**

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 JUNI 2017

**GUBERNUR RIAU**



**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Cut Nyak Dien II/2 Telepon (0761) 33266 Fax. (0761) - 33266

**P E K A N B A R U**

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**  
**NOMOR : Kpts. 23 /VII/2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah diamanatkan menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.485/VI/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman perencanaan pada tahun anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 485/VI/2017 Tanggal 9 Juni Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau agar menjadikan Rencana kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan pada APBD tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 28 Juli 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,**



**INDRAWATI NASUTION**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600104 198703 2 004**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dimaksudkan terutama upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 dapat terwujud.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baru terbentuk pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. BPKAD selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur organisasi BPKAD terbentuk dari penggabungan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan sebagian fungsi pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2018.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKAD mempunyai visi dan misi. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencerminkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik (Good Financial Governance) mengandung makna bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaannya, penatausahaannya, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tanggungjawab/akuntabilitas untuk memastikan perilaku pengelola keuangan dan aset yang baik untuk mencapai tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat

2. Profesional bermakna bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara kesepadanan kemampuan, keterampilan dan integritas aparatur pengelola keuangan serta pengambil kebijakan yang memfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan manfaat.
3. Handal mengandung makna bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau diarahkan untuk menjadi unit kerja yang terpercaya dan handal yaitu melalui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan pernyataan garis besar tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang harus dijalankan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2018, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7).

12. Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor 485 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2018.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja BPKAD Provinsi Riau adalah;

- ) Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 bagi setiap bagian dan bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau.
- ) Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2016

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPKAD
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

### BAB IV. PENUTUP

## BAB II

# Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2016

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja BPKAD tahun lalu (tahun 2016) dan pencapaian tahun berjalan (tahun 2017) kinerja Renstra BPKAD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPKAD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra BPKAD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BPKAD s/d TAHUN 2016  
PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02	URUSAN KEUANGAN										
3 00 02 02	BPKAD										
3 00 02 02 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase layananan administrasi perkantoran yang baik</b>									
3 00 02 02 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	10000	1800	2000	1700	85%	2000	5500	55%	BPKAD
3 00 02 02 01 006	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara	90	15	10	9	90%	20	44	49%	
3 00 02 02 01 008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis kebersihan kantor yang disediakan	51	0	15	5	33%	12	17	33%	
3 00 02 02 01 012	Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	126	26	40	32	80%	20	78	62%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 01 015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1380	180	300	180	60%	300	660	48%	BPKAD
3 00 02 02 01 017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	27200	3600	11600	3000	26%	4000	10600	39%	
3 00 02 02 01 018	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	2850	950	400	280	70%	500	1730	61%	
3 00 02 02 01 024	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD	272	52	55	36	65%	55	143	53%	
3 00 02 02 01 025	Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/Pengelolaan Arsip SKPKD	99000	19000	20000	20000	100%	20000	59000	60%	
3 00 02 02 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3.00.02.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	170	0	20	20	100%	50	70	41%	BPKAD
3.00.02.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	72	0	12	10	83%	20	30	42%	
3.00.02.02.02.022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	2	0	1	1	100%	0	1	50%	
3.00.02.02.02.024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	32	8	8	8	100%	0	16	50%	
3.00.02.02.02.028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	330	120	68	13	19%	50	183	55%	
3.00.02.02.02.062	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala genset	Jumlah genset yang dipelihara	4800	0	1200	1200	100%	1200	2400	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 02 078	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor	Jumlah jaringan gedung kantor yang dipelihara	20	0	5	4	80%	5	9	45%	BPKAD
3 00 01 01 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur</b>									
3 00 01 01 03 002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	180	0	0	0	0%	180	180	100%	
3 00 01 01 03 005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	450	150	360	150	42%	0	300	67%	
3 00 02 02 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase ketepatan penyampaian laporan</b>									
3 00 02 02 05 001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	90 orang	10	50	50	100%	10	70	78%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan									
3 00 02 02 06 001	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	22	7	5	5	100%	5	17	77%	BPKAD
3 00 02 02 06 013	Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Jumlah SDM akuntansi yang ditingkatkan	428	114	114	114	100%	100	328	77%	
3 00 02 02 06 014	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	2	4	4	100%	2	8	67%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 15 001	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jenis ASB yang disusun	20	10	10	10	100%	0	20	100%	BPKAD
3 00 02 02 15 002	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Jenis standar satuan harga yang disusun	1200	300	300	250	83%	200	750	63%	
3 00 02 02 15 14	Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek	1440	270	270	270	100%	300	840	58%	
3 00 02 02 15 021	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah jasa dan tenaga administrasi pengelolaan keuangan SKPKD	169	47	65	53	82%	57	157	93%	
3 00 02 02 15 023	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah tenaga pengelola kas daerah yang mengikuti up-grading kemampuan pengelolaan kasda	250	43	43	40	93%	50	133	53%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3.00.02.02.15.024	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Persentase data rekonsiliasi penerimaan daerah yang akurat	21	12	3	3	100%	3	18	86%	BPKAD
3.00.02.02.15.026	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	10	2	2	2	100%	2	6	60%	
3.00.02.02.15.027	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	10	2	2	2	100%	2	6	60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 15 028	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	10	2	2	2	100%	2	6	60%	BPKAD
3 00 02 02 15 030	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	91	41	20	8	40%	10	59	65%	
3 00 02 02 15 032	Kegiatan Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	304	72	72	72	100%	80	224	74%	
3 00 02 02 15 033	Kegiatan Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi	468	68	100	90	90%	100	258	55%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 15 034	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	11	5	6	6	100%	0	11	100%	BPKAD
3 00 02 02 15 036	Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah buku RKBMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	525	150	150	150	100%	75	375	71%	
3 00 02 02 15 039	Kegiatan Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset milik Pemprov. Riau	Jumlah buku sisdur penatausahaan aset daerah	141	41	100	100	100%	0	141	100%	
3 00 02 02 15 041	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diasuransikan	5	1	1	0	0%	1	2	40%	
3 00 02 02 15 044	Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan	160	0	40	34	85%	40	74	46%	
3 00 02 02 15 124	Kegiatan Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah aset yang dinilai	10	0	7	1	14%	1	2	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 15 125	Kegiatan Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	Jumlah jenis aset yang dipelihara	20	1	4	4	100%	5	10	50%	BPKAD
3 00 02 02 15 128	Kegiatan Inventarisasi Data Aset Daerah	Jumlah data aset yang diinventarisasi	168	43	43	43	100%	41	127	76%	
3 00 02 02 15 130	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah SDM yang menigkat kapasitasnya	370	0	100	100	100%	90	190	51%	
3 00 02 02 15 141	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	1000	200	200	200	100%	200	600	60%	
3 00 02 02 15 142	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Pergub Revisi Sisdur PKD	650	0	200	200	100%	150	350	54%	
3 00 02 02 15 143	Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti	9	4	5	4	80%	0	8	89%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 15 144	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang Pertanggungjawaban	48	0	12	12	100%	12	24	50%	BPKAD
3 00 02 02 15 160	Kegiatan Pengelolaan Aset Provinsi Riau	Jumlah aset yang dikelola	9	0	9	9	100%	0	9	100%	
3 00 02 02 15 161	Kegiatan Penyediaan Dukungan Tenaga Akutansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau	Jumlah tenaga akuntansi yang kompeten	516	42	114	108	95%	120	270	52%	
3 00 02 02 16	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu</b>									
3 00 02 02 16 007	Kegiatan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda APBD dan perubahan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	120	24	24	24	100%	24	72	60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD SKPD Tahun 2018 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPd tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2016 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)	tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 16 010	Kegiatan Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Jumlah buku profil keuangan daerah	100	0	100	100	100%	0	100	100%	BPKAD
3 00 02 02 16 013	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi	580	100	120	120	100%	120	340	59%	
3 00 02 02 16 014	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan Aset Kab/Kota	12	0	12	12	100	0	12	100%	
5 00 01 02 15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan</b>									
5 00 01 02 15 079	Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau	Frekuensi penertiban penggunaan barang milik daerah	22	2	5	5	100%	5	12	55%	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Riau dalam menyusun program kegiatan. Indikator kinerja juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif oleh karena itu dalam menetapkan rencana kerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 harus mengacu pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Indikator kinerja BPKAD Provinsi Riau yang mendukung dan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan 2004-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				2015	2016	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah			40%	60%	30%	85.24%	80%	100%	
2	Jumlah kegiatan operasional pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah			0	20	15	20	30	40	
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP			12	24		20	36	48	

### 2.3. Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2014-2019. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
2. Kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi belum maksimal;
4. Kualitas dan efektifitas perbendaharaan dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis, serta penerapan treasury single account/TSA, belum optimal;
5. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem teknologi informasi perencanaan, pelaporan, serta pengelolaan barang , belum maksimal;
6. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, belum optimal;
7. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal;
8. Pengelolaan barang milik daerah masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan azas fungsi, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran.

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## 2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

## 3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders.

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

### 2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh undang-undang no 25 tahun 2004 kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017  
Provinsi Riau

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Kegiatan Partisipasi Dalam pelaksanaan Pameran tahunan	Pekan baru	Jumlah data pameran /expo	20 data	80.000	Kegiatan Partisipasi Dalam pelaksanaan Pameran tahunan	Pekanbaru	Jumlah data pameran /expo	20 data	200.000	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Pekan baru	Jumlah rancangan KUA PPAS Provinsi riau tahun 2018 dan 2018	2 dokumen	590.372	Kegiatan Penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Pekanbaru	Jumlah rancangan KUA PPAS Provinsi riau tahun 2018 dan 2018	2 dokumen	590.372	
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekan baru	Jumlah surat kedinasan	2000 surat	75.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat kedinasan	650 surat	75.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekan baru	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20 unit	500.000	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20 unit	394.400	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekan baru	Jumlah jasa kebersihan	8 tenaga kebersihan	195.620	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov.Riau	Jumlah jasa kebersihan	6 tenaga kebersihan	345.620	
4	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekan baru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	150.000	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov.Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22 jenis	150.000	
5	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekan baru	Jumlah surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang-undangan	1200 expl, 300 buku	110.480	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pekanbaru	Jumlah surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang-undangan	14.784 expl, 250 buku	110.480	
6	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pekan baru	Jumlah penyedia makanan dan minuman	4000 porsi	357.500	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov.Riau	Jumlah penyedia makanan dan minuman	8000 porsi	357.500	
7	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah rapat / perjalanan dinas luar daerah/dalam daerah	500 oh	1.000.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah rapat / perjalanan dinas luar daerah/dalam daerah	400 oh	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	Pekan baru	Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD	55 unit ATK dan Barang cetakan	600.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	Pekanbaru	Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD	56 unit ATK dan 19 Barang cetakan	570.000	
9	Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD	Pekan baru	Jumlah penataan/pengelola arsip SKPKD	20.000 arsip	113.620	Kegiatan Pengelolaan Arsip SKPKD	Pekanbaru	Terwujudnya penataan/pengelola arsip SKPKD	20.000 arsip	113.620	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pekan baru	Jumlah perlengkapan kantor	50 unit	1.178.010	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan kantor	50 unit	1.178.010	
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Pekan baru	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	665.991	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	715.991	
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekan baru	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50 unit	175.745	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50 unit	175.745	
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Genset	Pekan baru	Jumlah pemeliharaan genset	12 kali, 1200 liter	97.500	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Genset	Pekanbaru	Jumlah pemeliharaan genset	12 kali, 1200 liter	97.500	
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor	Pekan baru	Jumlah pemeliharaan jaringan gedung kantor	5 sarana jaringan	95.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah pemeliharaan jaringan gedung kantor	4 sarana jaringan	95.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>											
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pekan baru	Jumlah pakaian dinas	180 stel	250.000	-	-	-	-	-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pekan baru	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai	10 orang	25.000	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pekanbaru	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai	10 orang	25.000	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
1	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekan baru	Jumlah dokumen renja,renstra,penja, RKA, dan Laporan kinerja	6 dokumen	130.852	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah dokumen renja,renstra,penja, RKA, dan Laporan kinerja	6 dokumen	81.170	
2	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Pekan baru	Jumlah sumber daya manusia yang memahami laporan keuangan berbasis akrual	100 orang	660.403	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Pekanbaru	Jumlah sumber daya manusia yang memahami laporan keuangan berbasis akrual	100 orang	660.403	
3	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pekan baru	Jumlah laporan keuangan triwulan /semesteran	2 laporan	245.619	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pekanbaru	Jumlah laporan keuangan triwulan /semesteran	2 laporan	245.619	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>											
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Pekan baru	Jumlah buku pegub standar satuan harga	200 Buku	350.000	Penyusunan Standar Satuan Harga	Pekanbaru	Jumlah buku pegub standar satuan harga	200 Buku	500.050	
2	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pekan baru	Jumlah Peserta sosialisasi dan bimtek	300 peserta	475.388	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Peserta sosialisasi dan bimtek	350 peserta	428.215	
3	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Jasa dan tenaga administrasi SKPKD	7 jasa 57 tenaga SKPKD	2.585.000	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Jasa dan tenaga administrasi SKPKD	5 jasa , 48 tenaga SKPKD	3.083.850	
4	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	Pekan baru	Jumlah peserta upgrading pengelolaan kasda	50 orang	418.649	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	Pekanbaru	Jumlah peserta upgrading pengelolaan kasda	50 orang	488.513	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Riau	Jumlah data rekonsiliasi kas daerah	12 Laporan bulanan	414.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Prov.Riau	Jumlah data rekonsiliasi kas daerah	12 Laporan bulanan	479.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	Pekan baru	Jumlah raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD	1 raperda APBD, 1 rapergub penjabaran APBD	1.748.109	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	Riau	Jumlah raperda APBA dan rapergub penjabaran APBD	1 raperda, 1 rapergub	1.828.109	
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pekan baru	Jumlah raperda APBDP dan rapergub penjabaran APBDP	1 raperda APBDP, 1 rapergub penjabaran APBD-P	1.642.634	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov.Riau	Tersusun laporan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau dan Tersusun Laporan Peraturan KDh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau	1 raperda APBDP, 1 rapergub penjabaran APBD-P	1.722.634	11
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Pekan baru	Jumlah raperda pertanggungjawaban APBD dan rapergub penjabaran pertanggungjawaban APBD	1 raperda, 1 rapergub	685.602	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDh Tentang Penjabaran	Prov.Riau	Tersusun laporan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau dan Tersusun Laporan Peraturan KDh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau	1 raperda, 1 rapergub	685.602	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyediaan Tenaga Dukungan Akuntansi,Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau	Pekan baru	Jumlah tenaga akuntansi Provinsi Riau	120 orang	3.830.376	Penyediaan Tenaga Dukungan Akuntansi,Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah tenaga akuntansi Provinsi Riau	91 orang	4.030.376	
10	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Pekan baru	Jumlah aplikasi dan admin SIKD	2 aplikasi, 10 orang	1.300.000	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Pekanbaru	Jumlah aplikasi dan admin SIKD	2 aplikasi, 10 orang	2.832.630	
11	Persiapan,Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Riau	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan BLUD	80 Peserta	232.284	Persiapan,Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Riau	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan BLUD	104 Peserta	201.244	
12	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Pekan baru	Jumlah Peserta desiminasi dan sosialisasi regulasi keuangan daerah	100 Peserta	324.487	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Peserta desiminasi dan sosialisasi regulasi keuangan daerah	200 Peserta	387.241	
13	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Riau	Jumlah buku daftar kebutuhan BMD dan kebutuhan pemeliharaan BMD	75 Buku	270.516	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Riau	Jumlah buku daftar kebutuhan BMD dan kebutuhan pemeliharaan BMD	75 Buku	301.421	
14	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Riau	Jumlah dokumen asuransi aset	1 dokumen	798.910	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Riau	Jumlah dokumen asuransi aset	1 dokumen	5.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pengamanan Aset Milik Daerah	Riau	Jumlah pengamanan aset	40 Lokasi	1.087.884	Pengamanan Aset Milik Daerah	Prov.Riau	Jumlah pengamanan aset	40 Lokasi	1.367.194	
16	Penilaian Aset Pemerintah Provinsi riau	Riau	Jumlah aset yang terdokumentasi	1 buku	359.729	Penilaian Aset Pemerintah Provinsi riau	Riau	Jumlah aset yang terdokumentasi	12 kab/kota	760.015	
17	Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	Riau	Jumlah pemeliharaan aset	5 lokasi	369.599	Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	Prov.Riau	Jumlah pemeliharaan aset	5 lokasi	1.017.304	
18	Inventarisasi Data Aset Daerah	Riau	Jumlah data aset	1 dokumen	389.564	Inventarisasi Data Aset Daerah	Riau	Jumlah data aset	12 kab/kota	815.798	
19	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemprov. Riau	Pekan baru	Jumlah peserta bimtek pengelolaan aset	90 peserta	212.200	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemprov. Riau	Pekanbaru	Jumlah peserta bimtek pengelolaan aset	90 peserta	1.167.834	
20	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pekan baru	Jumlah Peserta Bimtek Penatausaha keuangan	200 Peserta	350.810	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Peserta Bimtek Penatausaha keuangan	200 Peserta	374.170	
21	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan daerah	Pekan baru	Jumlah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	150 buku	282.100	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan daerah	Pekanbaru	Jumlah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	150 buku	252.960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Riau	Jumlah SK Gubernur	12 SK	263.742	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Riau	Jumlah SK Gubernur	12 SK	263.742	
<b>Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>											
1	Pembinaan pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pekan baru	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi	120 peserta	582.366	Pembinaan pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pekanbaru	Jumlah peserta rakor dan sosialisasi	120 peserta	539.366	
2	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Riau	Jumlah SK Gubernur	24 SK	446.806	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov.Riau	Jumlah SK Gubernur	24 SK	446.806	
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>											
1	Pelaksanaan Operasional penertiban,pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Riau	Jumlah laporang penggunaan barang milik daerah	5 laporan	406.391	Pelaksanaan Operasional penertiban,pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Riau	Jumlah laporang penggunaan barang milik daerah	5 laporan	1.168.082	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan rangkaian pengelolaan keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial pada fungsi PPKD. Belanja hibah dan bantuan sosial dimaksudkan untuk menampung usulan/aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Undang Undang 23 Tahun 2011 dan Permendagri 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Usulan kegiatan masyarakat tersebut disampaikan dalam bentuk proposal dan rekomendasi dari SKPD terkait untuk diusulkan pada mata anggaran belanja PPKD. Selain dari pengelolaan belanja PPKD tersebut, BPKAD juga mulai melaksanakan tugas-tugas fasilitasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau Program Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta/BUMD di lingkungan Provinsi Riau dalam bentuk mendukung kepentingan sosial masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan.

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu meningkat ke jenjang negara maju, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah:

- (1) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 (AEC);
- (2) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015; dan
- (3) perubahan iklim global.

Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (Comprehensive Reform) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita), diantaranya yang menjadi isu penting bagi rencana kerja BPKAD Provinsi Riau yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Hal ini akan diinterprestasikan dalam bentuk perbaikan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, akuntabilitas dan transparansi penyusunan anggaran daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, serta pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Hal ini akan didukung melalui upaya peningkatan kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah, peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas, peningkatan asistensi dan supervisi dengan instansi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi.

Didalam menunjang Kebijakan Nasional berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Pengendalian Anggaran Belanja SKPD;
4. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. Pelaksanaan pengelola kekayaan daerah;
6. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kab/kota, badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah;
8. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kebijakan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

## Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

VISI : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang Baik, Profesional, dan Terpercaya/Handal			
MISI I : Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah	1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan	1. Meningkatkan capacity building aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dan pengelolaan aset	1. meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan secara berkesinambungan melalui diklat berbasis kompetensi
		2. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah	1. Pelaksanaan pola kerja yang berbasis kinerja serta menerapkan reward dan punishment. 2. Meningkatkan standar moral aparatur pengelola keuangan melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct)
	2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah	1. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Menyempurnakan dan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) 2. Pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders)	1. Meningkatkan pelayanan prima	1. Meningkatnya efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik	1. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai 2. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
MISI II : Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan berbasis teknologi	1. Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), anggaran terpadu (unified budgeting)	1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja, standar

informasi		dan kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework / MTEF)	satuan harga dan standar pelayanan minimal 2. Perumusan kebijakan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DPA sesuai performance based budgeting, unified budgeting dan MTEF.
		2. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (Accrual basis budgeting)	1. Penyempurnaan format APBD yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) dan Bagan Akun Standar
	2. Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien	1. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana	1. Meningkatkan konsistensi pencairan dana yang tepat waktu yang selaras dengan perencanaan anggaran kas, otorisasi SPD dan rencana penerimaan kas 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja
		2. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (treasury single account) framework.	1. Mendorong sistem pencairan dana anggaran dengan sistem Treasury Single Account (TSA) 2. Mendorong penerapan fully electronic transaction dengan melibatkan perbankan dan institusi terkait (BPK), baik di bidang pengeluaran maupun penerimaan negara.
	1. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI	1. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota	1. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan secara periodik 2. Merumuskan reward and punishment terkait penyampaian laporan keuangan
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, ekonomis,	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran, penatausahaan, akuntansi	1. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

transparan dan akuntabel		dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan.	dan kekayaan daerah 2. Perumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
	2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	1. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) 2. Penerapan Treasury Single Account (TSA).
		2. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan	1. Meningkatkan kualitas penyusunan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pengelolaan kekayaan daerah, BUMD, BLUD dan pemberian bantuan keuangan 2. Review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan keuangan beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan	1. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah;	1. Penyempurnaan sistem informasi dan data base yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal di daerah 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan dokumen keuangan keuangan yang lebihdipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan	

MISI III : Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten/kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan kabupaten/kota	1. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan kab/kota	1. Pelaksanaan evaluasi APBD/PAPB dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
		2. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa	1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi dan pemberian bimbingan teknis 2. Perumusan kebijakan dan produk hukum daerah terkait pemberian bantuan keuangan
Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	1. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan	1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel 2. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kab/kota

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2014-2019. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;

5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;
7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan treasury single account/TSA, belum optimal;
8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota belum optimal.
9. Pengelolaan barang milik daerah masih harus dioptimalkan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi informasi;
4. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai;
5. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset daerah kabupaten/kota;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;
4. Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;

6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah	1.Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan aset daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan keuangan dan aset daerah (Kursus Keuangan Daerah)	20 %	40%	60%	80%	100%
			Tersedianya SDM keahlian Akuntansi dan Teknologi Informasi serta penilai aset	20 %	40%	60%	80%	100%
		2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan sarana dan prasarana	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholders)	1.Meningkatkan pelayanan prima	Penyelesaian administrasi anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan tepat waktu, serta administrasi aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelesaian evaluasi APBD/papbd dan pertanggungjawaban APBD kab/kota tepat waktu	80%	90%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi informasi	1. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja	Akurasi kesesuaian perencanaan (RKPD/KUA/PPAS) dan penganggaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah SKPD yang terintegrasi on-line dengan SIPKD dan SIMDA BMD	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	12,5%	10%	7,5%	5%	2%
			Persentase Penyerapan anggaran	87,5%	90%	92,5%	95%	98%
		3.Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI	Penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah LKPD Kab/Kota yang terkonsolidasi dengan Provinsi dalam kerangka GFS (Government Financial Statistic)	16%	25%	50%	75%	100%
4	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan APBD/PAPBD dan pertanggungjawab-an pelaksanaan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		2.Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini LKPD dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3.Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Publikasi informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi keuangan dan aset kabupaten/kota	1. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan dan aset kab/kota	Penyusunan APBD/PAPBD Kab/Kota dan Pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah RSUD/Unit kerja Kab/Kota yang menerapkan PPK-BLUD	30%	50%	80%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset kabupaten/ kota	1.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kab/kota	Jumlah kab/Kota yang mendapat opini WTP dari BPK	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 3.3.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2016, adalah sebagai berikut:

1. Program Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
2. Program Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
3. Program Belanja Tidak Terduga;
4. Program Bantuan Hibah BOS;
5. Program Bantuan Hibah Lainnya;
6. Program Bantuan Sosial;
7. Program Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
15. Program Pengembangan Data/Informasi
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah

#### 3.3.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana

strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan BPKAD T.A 2016 tidak sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan per program serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018  
dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Riau

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Belanja Daerah				22.294.880.500				
				Belanja Langsung				22.294.880.500				
02	02	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yang baik			3.750.960.000				4.126.056.000
				Kegiatan :								
02	02	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2000 surat	19.875.000	APBD Provinsi Riau		2000 surat	21.862.500
02	02	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	Pekanbaru	- MB - M3 61260 KWH	500.000.000	APBD Provinsi Riau		- MB - M3 61260 KWH	550.000.000
02	02	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pekanbaru	20 Unit	310.125.000	APBD Provinsi Riau		20 Unit	341.137.500
02	02	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan	Pekanbaru	12 orang 25 jenis	270.960.000	APBD Provinsi Riau		12 orang 25 jenis	298.056.000
02	02	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	15 jenis	50.000.000	APBD Provinsi Riau		15 jenis	55.000.000
02	02	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pekanbaru	4 jenis	50.000.000	APBD Provinsi Riau		4 jenis	55.000.000
02	02	01	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Pekanbaru	12000 porsi	350.000.000	APBD Provinsi Riau		12000 porsi	385.000.000
02	02	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pekanbaru	500 kali	900.000.000	APBD Provinsi Riau		500 kali	990.000.000
02	02	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Pekanbaru	8 Tenaga Keamanan	250.000.000	APBD Provinsi Riau		8 Tenaga Keamanan	275.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	02	01	024	Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	Jumlah barang dan jasa pelayanan administrasi SKPKD	Pekanbaru	55 unit	1.000.000.000	APBD Provinsi Riau		55 unit	1.100.000.000
02	02	01	025	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Penataan/ Pengelolaan Arsip SKPKD	Pekanbaru	2000 kotak	50.000.000	APBD Provinsi Riau			55.000.000
02	02	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja			1.573.820.000				1.731.202.000
				Kegiatan :								
02	02	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Pekanbaru	50 Unit	450.000.000	APBD Provinsi Riau		50 Unit	495.000.000
02	02	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Pekanbaru	20 Unit	400.000.000	APBD Provinsi Riau		20 Unit	440.000.000
02	02	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	450 m2	150.000.000	APBD Provinsi Riau		450 m2	165.000.000
02	02	02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	50 Unit	166.000.000	APBD Provinsi Riau		50 Unit	182.600.000
02	02	02	043	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Luasan Gedung Kantor yang di Rehab	Pekanbaru	250 m2	207.820.000	APBD Provinsi Riau		250 m2	228.602.000
02	02	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Jumlah genset yang dipelihara	Pekanbaru	2 Unit	100.000.000	APBD Provinsi Riau		2 Unit	110.000.000
02	02	02	129	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon	Jumlah jaringan listrik, air dan telepon yang dipelihara	Pekanbaru	3 unit	100.000.000	APBD Provinsi Riau		3 unit	110.000.000
02	02	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara			205.863.000				218.700.000
				Kegiatan :								
02	02	05	001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan luar Provinsi Riau	10 orang	50.000.000	APBD Provinsi Riau		10 orang	50.000.000
02	02	05	012	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Fisik dan Mental	Pekanbaru	120 ASN	17.000.000	APBD Provinsi Riau		120 ASN	18.700.000
02	02	05	204	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	Provinsi Riau	90 Peserta	138.863.000	APBD Provinsi Riau		90 Peserta	150.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	02	06		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan			529.031.400				604.934.540
				Kegiatan :								
02	02	06	013	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	Pekanbaru	100 Orang	291.053.400	APBD Provinsi Riau		100 Orang	320.158.740
02	02	06	014	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Pekanbaru	2 dokumen	167.978.000	APBD Provinsi Riau		2 dokumen	184.775.800
02	02	06	120	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Pekanbaru	80 dokumen	70.000.000	APBD Provinsi Riau		80 dokumen	100.000.000
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN							100 Orang	
02	02	15		Program : Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data/Informasi			81.320.000				250.000.000
				Kegiatan :								
02	02	15	006	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Frekuensi mengikuti pameran	Pekanbaru	1 kali	81.320.000	APBD Provinsi Riau		1 kali	250.000.000
				KEUANGAN								
02	02	15		Program : Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Data/Informasi			15.236.885.900				17.003.022.840
				Kegiatan :								
02	02	15	018	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	Pekanbaru	24 unit	250.000.000	APBD Provinsi Riau		24 unit	275.000.000
02	02	15	023	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah tenaga administrasi dan pengelola keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Riau	57 Orang	1.974.542.000	APBD Provinsi Riau		57 Orang	2.000.000.000
02	02	15	024	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Frekuensi pertemuan/rapat yang dilaksanakan	Pekanbaru	26 kali	283.178.000	APBD Provinsi Riau		26 kali	311.495.800
02	02	15	026	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.	Jumlah Ranperda yang disusun	Pekanbaru	2 Ranperda	983.450.000	APBD Provinsi Riau		2 Ranperda	1.000.000.000
02	02	15	027	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Jumlah Ranperda yang disusun	Pekanbaru	2 Ranperda	819.950.000	APBD Provinsi Riau		2 Ranperda	901.945.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	02	15	028	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Jumlah Ranperda yang disusun	Pekanbaru	2 Ranperda	449.998.000	APBD Provinsi Riau		2 Ranperda	494.997.800
02	02	15	029	Penyediaan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau.	Jumlah Tenaga akuntansi yang disediakan	Pekanbaru	120 Orang	3.874.814.000	APBD Provinsi Riau		120 Orang	4.262.295.400
02	02	15	030	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Pekanbaru	2 Aplikasi	883.233.000	APBD Provinsi Riau		2 Aplikasi	971.556.300
02	02	15	033	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah regulasi yang disusun, jumlah peserta desminasi dan sosialisasi	Pekanbaru	2 Regulasi, 200 Orang	361.785.000	APBD Provinsi Riau		2 Regulasi, 200 Orang	397.963.500
02	02	15	035	Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pergub Sisdur PKD	Pekanbaru	150 buku Pergub	183.590.000	APBD Provinsi Riau		150 buku Pergub	200.000.000
02	02	15	037	Pembuatan alas hak dan sertifikat tanah milik Pemprov Riau	Jumlah tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang disertifikasi	Pekanbaru	5 Sertifikat	644.209.000	APBD Provinsi Riau		5 Sertifikat	708.629.900
02	02	15	041	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jenis BMD yang diasuransikan	Pekanbaru	6 Jenis	270.758.000	APBD Provinsi Riau		6 Jenis	297.833.800
02	02	15	044	Pengamanan Aset Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan	Pekanbaru	40 Unit	768.405.500	APBD Provinsi Riau		40 Unit	800.000.000
02	02	15	124	Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau	Jenis BMD yang dinilai	Pekanbaru	6 Jenis	350.000.000	APBD Provinsi Riau		6 Jenis	385.000.000
02	02	15	125	Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	Jenis BMD yang dipelihara	Pekanbaru	6 Jenis	425.459.400	APBD Provinsi Riau		6 Jenis	468.005.340
02	02	15	163	Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan Akibat Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Ranperda dan Ranpergub yang disusun	Provinsi Riau	2 Dokumen	150.000.000	APBD Provinsi Riau		2 Dokumen	165.000.000
02	02	15	165	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah BMD yang diproses pemindahtangan	Provinsi Riau	24 Unit	250.000.000	APBD Provinsi Riau		24 Unit	275.000.000
02	02	15	166	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	200 Dokumen	353.000.000	APBD Provinsi Riau		200 Dokumen	388.300.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02	02	15	167	Penyusunan Keputusan KDH Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Keputusan KDH Tentang Penetapan Status BMD	Provinsi Riau	40 OPD	134.680.000	APBD Provinsi Riau		40 OPD	200.000.000
02	02	15	168	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah buku Peraturan KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	Provinsi Riau	7 Buku	586.194.000	APBD Provinsi Riau		7 Buku	600.000.000
02	02	15	169	Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekonsiliasi dan pembinaan	Provinsi Riau	1 Kali	215.273.000	APBD Provinsi Riau		1 Kali	900.000.000
02	02	15	170	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	Provinsi Riau	7 Dokumen	175.200.000	APBD Provinsi Riau		7 Dokumen	200.000.000
02	02	15	171	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Dalam dan luar Provinsi Riau	7 Buku/Laporan	720.678.000	APBD Provinsi Riau		7 Buku/Laporan	600.000.000
02	02	15	172	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	Dalam dan luar Provinsi Riau	2 kali	128.489.000	APBD Provinsi Riau		2 kali	200.000.000
02	02	16		Program : Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu			535.992.200				719.916.420
				Kegiatan :								
02	02	16	007	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.	Jumlah SK Gubernur tentang Evaluasi APBD/P Kab/Kota	Pekanbaru	24 SK Gubernur	144.770.000	APBD Provinsi Riau		24 SK Gubernur	200.000.000
02	02	16	015	Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan LKPD dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dilakukan tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Provinsi Riau	12 SK Gubernur tentang Pertanggung Jawaban	124.480.000	APBD Provinsi Riau		12 SK Gubernur tentang Pertanggung Jawaban	200.000.000
02	02	16	016	Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor dan Sosialisasi	Provinsi Riau	1 Rakor dan 1 Sosialisasi	135.000.000	APBD Provinsi Riau		1 Rakor dan 1 Sosialisasi	175.000.000
02	02	16	017	Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Teknis Penyusunan APBD Kab/Kota	Pekanbaru	12 Kab/Kota	131.742.200	APBD Provinsi Riau		12 Kab/Kota	144.916.420

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PENGAWASAN								
02	02	15		Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase Pencapaian Daya Serap APBD dan APBN Persentase Penurunan Penyimpangan Non Keuangan Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelola Keuangan			381.008.000				419.108.800
				Kegiatan :								
02	02	15	031	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Jumlah Penertiban Penggunaan Barang Milik Daerah	Pekanbaru	12 Kab/Kota	381.008.000	APBD Provinsi Riau		12 Kab/Kota	419.108.800
								TOTAL	22.294.880.500			7.575.000.000

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2014 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait lainnya.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.